

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017



Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa

Gowa - Sulawesi Selatan 92111

Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298

e-mail : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa

Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298

Gowa - Sulawesi Selatan 92111

e-mail : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gowa, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

DRS. MUHAMMAD AMIN, MA.
NIP.196907162003121003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungguminasa	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	47
C.6. Ekuitas	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	49
D.2. Beban Pegawai	49

D.3.	Beban Persediaan	50
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	51
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	53
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	56
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	57
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	58
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	58
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	59
E.3.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	59
	Laporan-laporan Pendukung.....	62
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	63
	Daftar Hibah Langsung.....	66

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2017 dan 2016	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2017	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2017 dan 2016	35
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017	36
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017.....	36
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016.....	37
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016	37
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016	38
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016.....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016.....	40
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka	41
Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016	41
Tabel 15 Rincian Aset Tetap	42
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	46
Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud	47
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016	48
Tabel 20 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017.....	64
Tabel 21 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	67
Tabel 22 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	68

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jalan Masjid Agung No. 25 Sungguminasa Gowa - Sulawesi Selatan 92111
Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298 e-mail : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gowa, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

DRS. MUHAMMAD AMIN, MA.
NIP.196907162003121003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.443.089 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.751.368.830 atau mencapai 99,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.795.802.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	1.443.089	0,00	3.324.140
Belanja Negara	4.795.802.000	4.751.368.830	99,07	3.312.767.650

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.934.618.394, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2.427.750; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 21.932.190.644; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 33.215.746 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 33.215.746 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 21.901.402.648, sehingga jumlah Ekuitas dan Kewajiban sebesar Rp.21.934.618.394.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2017	Tahun 2016	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	2.427.750	6.401.550	(3.973.800)	(38)
Aset Tetap	21.932.190.644	6.160.599.759	15.771.590.885	356
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	21.934.618.394	6.167.001.309	15.767.617.085	356
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	33.215.746	32.471.034	744.712	2,02
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	33.215.746	32.471.034	744.712	2,02
Jumlah Ekuitas Dana	21.901.402.648	6.134.530.275	15.766.872.373	257,02
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.934.618.394	6.167.001.309	15.767.617.085	255,68

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.443.050, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.4.822.720.161 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.4.281.277.111) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.159.489 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp.4.821.117.622).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.6.134.530.275 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.4.821.117.622) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.14.938.064.254 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.5.649.925.741 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.21.901.402.648

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.443.089	0,00	3.324.140
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1.443.089	0,00	3.324.140
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.728.394.000	3.706.375.841	99,41	2.764.936.145
2.	Belanja Barang	B.2.2.	814.408.000	792.052.989	97,26	389.911.505
3.	Belanja Modal	B.2.3.	253.000.000	252.940.000	99,98	157.920.000
	Jumlah Belanja Negara		4.795.802.000	4.751.368.830	99,07	3.312.767.650

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

NERACA

PER 31 Desember 2017 DAN 2016

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	1.081.050
Persediaan	C.1. 3.	2.427.750	5.320.500
Jumlah Aset Lancar		2.427.750	6.401.550
Aset Tetap			
Tanah			
Tanah	C.2. 1.	13.777.652.000	2.430.736.000
Peralatan dan Mesin			
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.070.216.805	1.817.276.805
Gedung dan Bangunan			
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7.806.677.000	4.019.618.300
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya			
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	35.607.800	35.607.800
Konstruksi dalam Pengerjaan			
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.757.962.961)	(2.142.639.146)
Jumlah Aset Tetap		21.932.190.644	6.160.599.759
Aset tak Berwujud			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	6.000.000	6.000.000
Aset Lain-Lain			
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	365.010	365.010
Aset Lainnya yang Belum Diregister			
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(6.365.010)	(6.365.010)
Jumlah Aset		21.934.618.394	6.167.001.309
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	33.215.746	32.471.034
Uang Muka dari KPPN			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	33.215.746	32.471.034
Jumlah Kewajiban	33.215.746	32.471.034

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

C.6

Jumlah Ekuitas Dana	21.901.402.648	6.134.530.275
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.934.618.394	6.167.001.309

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	30 Juni 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.443.050	3.324.140
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.708.422.021	2.708.479.545
Beban Persediaan	D. 3	39.883.300	29.255.950
Beban Barang dan Jasa	D. 4	420.048.059	187.436.522
Beban Pemeliharaan	D. 5	292.014.212	123.812.318
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	42.939.200	37.849.600
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	319.413.369	99.188.664
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.822.720.161	3.186.022.599
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		159.489	822.100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		156.489	822.100

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(4.821.117.622)	(3.181.876.359)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	30 Juni 2016
Ekuitas Awal	E. 1	6.134.530.275	6.014.247.158
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.281.117.622)	(3.181.876.359)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	14.938.064.254	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(6.000.000)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	5.766.872.373	3.309.443.510
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	15.766.872.373	121.567.151
Ekuitas Akhir		21.901.402.648	6.135.814.309

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah Mewujudkan Lembaga yang Memberikan Jaminan Kepastian bagi Penyelenggaraan Peradilan dan Pelayanan, perwujudan sebuah lembaga dapat memberikan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan dengan wujud transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Misi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN BAGI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN PELAYANAN”

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan Persidangan dan Pelayanan
2. Menjadikan lembaga Peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat
3. Meningkatkan kinerja Peradilan berbasis Teknologi Informasi
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapa
tan
Negara
dan
Hibah :
Rp1.443.
089

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.443.089 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	362.000	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.081.050	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39	0,00
Total Pendapatan			1.443.089	0,00

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	362.000	1.086.000	(724.000)	(66,66)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.081.050	2.238.140	(1.157.090)	(51,69)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	39	0	39	0,00
Total Pendapatan		1.443.089	3.324.140	(1.881.051)	0,00

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
4.751.36
8.830

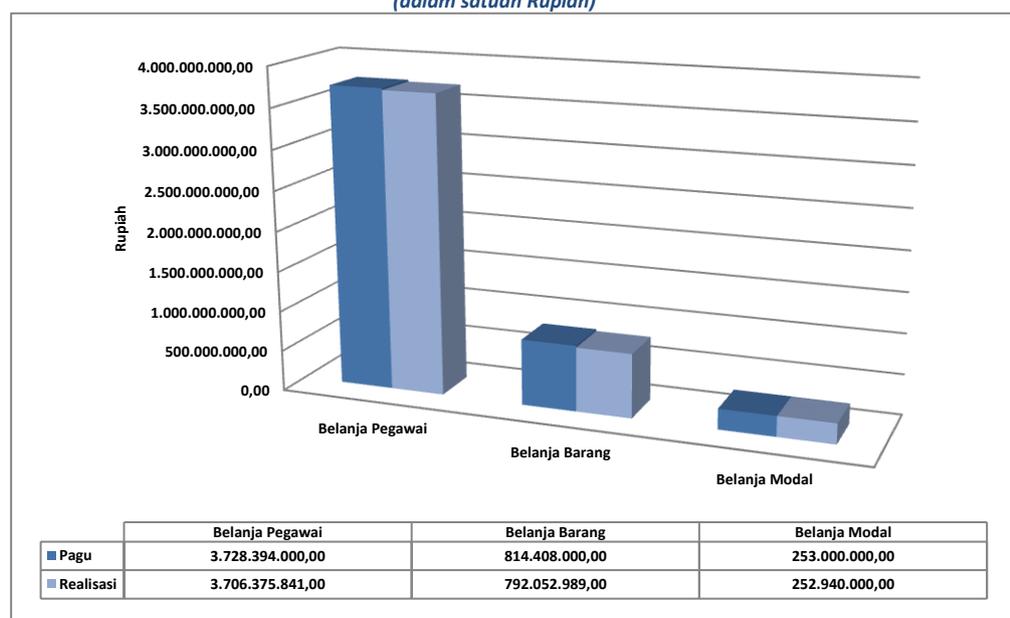
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.751.368.830 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,07% dari anggaran senilai Rp. 4.795.802.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.728.394.830	3.706.377.501	99,41
Belanja Barang	814.408.000	792.052.989	97,26
Belanja Modal	253.000.000	252.940.000	99,98
Total Belanja Bruto	4.795.802.000	4.751.370.490	99,07
Pengembalian Belanja	0	(830)	0
Total Belanja Netto	4.795.802.000	4.751.370.490	99,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.706.375.841	2.764.936.145	941.439.696	34,05
Belanja Barang	792.052.989	389.911.505	402.141.484	103,14
Belanja Modal	252.940.000	157.920.000	95.020.000	60,17
Total Belanja	4.751.368.830	3.312.767.650	1.438.601.180	43,43

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp
3.706.37
5.841

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 3.706.375.841 dan Rp. 2.764.936.145.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.803.703.770	1.272.236.200	532.467.570	41,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.664	16.208	6.456	39,83
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.160.207	78.050.230	31.109.977	39,86
Beban Tunj. Anak PNS	41.086.081	27.868.910	13.217.171	47,43
Beban Tunj. Struktural PNS	32.620.000	13.630.000	18.990.000	139,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.127.790.000	856.085.000	271.705.000	31,74
Beban Tunj. PPh PNS	125.584.269	134.624.692	9.040.423	(6,72)
Beban Tunj. Beras PNS	83.293.860	57.936.000	31.357.860	54,13
Beban Uang Makan PNS	278.502.000	199.484.000	79.018.000	39,61
Beban Tunjangan Umum PNS	4.810.000	5.365.000	555.000	(10,34)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	95.850.000	81.000.000	14.850.000	18,33
Beban Uang Lembur	0	38.640.000	(38.640.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	3.706.375.841	2.764.936.240	941.439.696	34,05

Pengembalian Belanja	(234)	(95)	(139)	146,32
Total Belanja Netto	1.802.470.727	2.764.936.145	(962.465.418)	(34,80)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
792.052.
989

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 792.052.989 dan Rp. 433.371.705.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	278.581.200	114.766.000	163.815.200	142,74
Belanja Barang Non Operasional	25.730.550	12.720.750	13.009.800	102,27
Belanja Barang Persediaan	67.129.300	82.607.100	(15.477.800)	(18,74)
Belanja Jasa	110.956.727	71.902.737	39.053.990	54,32
Belanja Pemeliharaan	261.716.012	113.525.518	148.190.494	130,53
Belanja Perjalanan Dinas	42.939.200	37.849.600	8.089.600	12,21
Belanja Barang Operasional Lainnya	5.000.000	0	5.000.000	100
Total Belanja Brutto	792.052.989	433.371.705	358.681.284	82,77
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	792.052.989	433.371.705	358.681.284	82,77

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp.
252.940.
000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 252.940.000 dan Rp. 157.920.000.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%

Belanja Modal Peralatan & Mesin	252.940.000	157.920.000	95.020.000	99,94
Total Belanja Brutto	252.940.000	157.920.000	95.020.000	99,94
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	252.940.000	157.920.000	95.020.000	99,94

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
2.427.750

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.427.750 dan Rp. 6.401.550.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	1.081.050
Persediaan	2.427.750	5.320.500
Total Aset Lancar	2.427.750	6.401.550

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember 2016
1.	Kas di Bendahara Bengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp.0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.081.050. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016
1.	Belanja Dibayar di Muka	0	1.081.050
Jumlah		0	1.081.050

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.2.427.750*

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.427.750 dan Rp. 5.320.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	1.763.950	4.403.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	663.800	917.500
4	Suku Cadang	0	0

5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		2.427.750	5.320.500

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
21.932.190.644

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 21.932.190.644 dan Rp. 6.160.599.759. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	13.777.652.000	2.430.736.000	11.346.916.000
2	Peralatan dan Mesin	2.070.216.805	1.817.276.805	252.940.000
3	Gedung dan Bangunan	7.806.677.000	4.019.618.300	3.787.058.700
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	35.607.800	35.607.800	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		23.690.153.605	8.303.238.905	252.940.000
Akumulasi Penyusutan		(1.757.962.961)	(2.142.639.146)	384.676.185
Nilai Buku Aset Tetap		21.932.192.644	6.160.599.759	15.771.590.885

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
13.777.652.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah

sebesar Rp. 13.777.652.000 dan Rp. 2.430.736.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.070.216.805*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.070.216.805 dan Rp. 1.817.276.805.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	1.817.276.805
Mutasi Tambah	
Pembelian	252.940.000
Mutasi Kurang	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2017	2.070.216.805
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(1.571.868.938)
Nilai Buku 31 Desember 2017	498.347.867

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
7.806.677.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.806.677.000 dan Rp. 4.019.618.300.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	4.019.618.300
----------------------------	---------------

Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	2.887.058.700
Hibah Masuk	900.000.000
Mutasi Kurang	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2017	7.806.677.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(92.970.857)
Nilai Buku 31 Desember 2017	7.713.706.143

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
35.607.800*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.

35.607.800 dan Rp. 35.607.800.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	35.607.800
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2017	35.507.800
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	35.507.800

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp(1.757.962.961)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(1.757.962.961) dan Rp(2.142.639.146).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A

Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.070.216.805	(1.664.992.104)	405.224.701
2	Gedung dan Bangunan	7.806.677.000	(92.970.857)	7.713.706.143
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	35.607.800	0	0
	Jumlah	9.880.454.605	(1.757.962.961)	8.122.491.644

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp 6.000.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.000.000 dan Rp. 6.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	6.000.000
Jumlah Total		6.000.000

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 0*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 365.010 dan Rp. 365.010. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Sungguminasa serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	365.010
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	365.010

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.33.215.746*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 33.215.746 dan Rp. 32.471.034. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat

sebesar Rp. 32.471.034

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Uang Muka dari KPPN	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	33.215.746	32.471.034
Jumlah	33.215.746	32.471.034

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
21.901.402.648

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.901.402.648 dan Rp6.134.530.275. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 744.712 (2,29%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 33.215.746 , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 32.471.034

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp1.443.089 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.443.089 dan Rp3.324.140. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	362.000	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.081.050	0,00
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39	0,00
Total Pendapatan			1.443.089	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 3.708.422.021 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.708.422.021 dan Rp2.708.479.545. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.803.703.770	1.272.236.200	532.467.570	41,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.664	16.208	6.456	39,83
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.160.207	78.050.230	31.109.977	39,86

Beban Tunj. Anak PNS	41.086.081	27.868.910	13.217.171	47,43
Beban Tunj. Struktural PNS	32.620.000	13.630.000	18.990.000	139,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.127.790.000	856.085.000	271.705.000	31,74
Beban Tunj. PPh PNS	125.584.269	134.624.692	9.040.423	(6,72)
Beban Tunj. Beras PNS	83.293.860	57.936.000	31.357.860	54,13
Beban Uang Makan PNS	278.502.000	199.484.000	79.018.000	39,61
Beban Tunjangan Umum PNS	4.810.000	5.365.000	555.000	(10,34)
Beban Tunjangan Kemahalan	95.850.000	81.000.000	14.850.000	18,33
Hakim				
Beban Uang Lembur	0	38.640.000	(38.640.000)	(100,00)
Total Beban Pegawai	3.708.422.021	4.701.352.804	(992.930.783)	(21,12)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
39.883.300*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.39.883.300 dan Rp.28.955.450. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	39.883.300	57.685.750	(17.802.450)	(30,86)
Total Beban Persediaan	39.883.300	54.685.750	(17.802.450)	(30,86)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
420.048.059*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.420.048.059 dan Rp.187.436.522. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Keperluan Perkantoran	198.524.000	166.854.000	31.670.000	18,98
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	442.000	1.345.960	(903.960)	(67,16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42.600.000	48.000.000	(5.400.000)	(11,25)
Beban Barang Operasional Lainnya	42.170.200	22.246.000	19.924.200	89,56
Beban Bahan	25.730.550	22.778.525	2.952.025	12,96
Beban Langganan Listrik	102.528.268	111.423.641	(8.895.373)	(7,98)
Beban Langganan Telepon	1.006.041	11.435.647	(10.429.606)	(91,20)
Beban Langganan Air	7.047.000	2.994.500	4.052.500	135,33
Total Beban Jasa	420.048.059	387.078.273	32.969.786	8,52

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 292.014.212*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.292.014.212 dan Rp.209.199.947. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.071.300	85.174.553	79.923.747	93,86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.644.712	102.314.394	(5.669.682)	(5,54)
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	30.298.200	21.711.000	8.587.200	39,55
Total Beban Pemeliharaan	292.014.212	209.199.947		

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.42.939.200*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.42.939.200 dan Rp.44.389.600. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	41.439.200	41.399.600	39.600	0.10
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	1.500.000	2.990.000	(1.490.000)	(49.83)
Total Beban Perjalanan Dinas	42.939.200	44.389.600	(1.450.400)	(3.27)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 319.413.369

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.319.413.369 dan Rp.222.123.773. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	186.246.329	141.731.407	44.514.922	31.40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.167.040	80.392.366	52.774.674	65.64
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi,	0	0	0	0

dan Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap					
Lainnya					
	Jumlah Penyusutan	319.413.369	222.123.773	52.774.674	97.06
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud					
Beban Penyusutan Aset lain-lain					
Jumlah Amortisasi					
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	319.413.369	222.123.773	52.774.674	97.06	

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain

per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional :
Rp. 159.489

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	39	0	39	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	291.050	1.895.850	(1.604.800)	(84.64)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	131.600	130.700	900	0.68

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	159.489	1.765.150	(1.605.661)	83.95
--	---------	-----------	-------------	-------

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.6.134.530.275 dan Rp.6.014.247.158

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(4.821.117.622) dan Rp(5.613.442.927) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.14.938.064.254 dan Rp.0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp(6.000.000) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas

hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.5.649.925.741 dan Rp.5.741.713.935

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.443.089)
Ditagikan ke Entitas Lain	4.751.368.830
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5.649.925.741

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas

pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp(1.443.089) sedangkan DKEL sebesar Rp.4.751.368.830

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	Warga Pengadilan Agama Sewilayah PTA Makassar	Barang	400.000.000
3	PTWP Sulawesi Selatan dan Barat	Barang	500.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.21.901.402.648 dan Rp.6.134.530.275

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

NIHIL

F.2. Pengungkapan Lain-lain

NIHIL

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

NIHIL

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

NIHIL

F.2.3. Rekening Pemerintah

No	Nomor Rek	Atas Nama	Nama Bank	Jenis Rek	Tujuan Pembukaan	Izin Pembukaan
1.	022501000243305	BPG PA SUNGGUMINASA (307491)	PT. BRI (PERSERO) CAB. SUNGGUMINASA	GIRO	PENAMPUNG DIPA BUA	KPPN NO. S- 976/WPB.24/K P.0230/2015 TGL. 06/04/2015
2.	022501001171307	BPG PA SUNGGUMINASA (309075)	PT. BRI (PERSERO) CAB. SUNGGUMINASA	GIRO	PENAMPUNG DIPA BADILAG	KPPN NO. S- 1175/WPB.24/ KP.0230/2015 TGL. 04/05/2015

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi terkait koreksi akun Belanja Modal Lainnya berupa pembelian Antivirus (536111) menjadi Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) berupa Pengadaan Antivirus Masa Aktif 1 (satu) tahun. Revisi Ke 1 ini tertanggal 6 November 2017
2. Revisi terkait Perubahan Halaman III DIPA berupa Estimasi Pendapatan dan Revisi Terkait Pagu Minus Belanja Pegawai, Revisi ke 2 ini tertanggal 30 November 2017

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Ralat SPM pada bulan November 2017 dilakukan dengan adanya Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 151/BUA/OT.01.1/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Pemberitahuan Penyesuaian Kode Akun Belanja Modal TA 2017. Ralat SPM Nomor 00014 tanggal 16 Februari 2017 untuk Realisasi Belanja Modal Lainnya dengan Akun (536111) sebesar Rp. 5.000.000,- diralat ke Akun (521119) Belanja Barang Operasional Lainnya, dengan melakukan Revisi DIPA terlebih dahulu.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

NIHIL

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sungguminasa

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	418.544.117	0	0	0	418.544.117
2	Alat Kantor	5	134.740.091	0	0	90.100.000	224.840.091
3	Alat Rumah Tangga	5	628.837.885	0	0	97.880.000	726.717.885
4	Alat Komunikasi	5	18.648.343	0	0	0	18.648.343
5	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0	0
6	Unit Alat Laboratorium	8	0	0	0	0	0
7	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15	0	0	0	0	0
8	Komputer Unit	4	482.525.765	0	0	55.000.000	537.525.765
9	Peralatan Komputer	4	153.472.800	0	0	9.960.000	163.432.800
1	Alat Kerja Penerbangan	10	0	0	0	0	0
1	Peralatan Olah Raga	3	567.608	0	0	0	537.608
B.	Gedung dan Bangunan						

1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	3.474.044.300	0	(663.993.974)	3.771.613.674	6.581.664.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	545.574.000	0	(92.747.580)	772.186.580	1.225.013.000
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	35.607.800	0	0	0	35.607.800
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0
2	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
3	Alat Rumah Tangga	5	365.010	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		8.323.663.720	0	(756.741.554)	16.143.656.254	23.710.578.420

Pengadilan Agama Sungguminasa
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
1	WARGA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	BARANG (MUSHALLA)		500.000.000	500.000.000	0	-
2	WARGA PTWP DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	BARANG (LAPANGAN TENNIS INDOOR)		400.000.000	400.000.000	0	-
			Jumlah :	900.000.000	900.000.000		

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

01

1900

307491

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}